

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi penelitian skripsi. Kesimpulan tersebut merujuk pada pembahasan bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

#### **5.2 Simpulan**

Permasalahan yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana daerah Aceh mendapatkan otonomi daerah yang dibahas dari tahun 1970-2005. Kesimpulan ini memaparkan beberapa pokok pikiran yang merupakan inti dari permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Latar belakang berlakunya otonomi daerah di Aceh tidak bisa dilepaskan dari konflik yang terjadi di Aceh yang disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat kondisi ini disebabkan oleh keadaan Aceh dengan pemerintah pusat mengalami pasang surut baik perihal kepentingan keduanya atau tata cara kelola hasil sumber daya. Permasalahan antara pemerintah pusat dan Aceh sudah dimulai dari era Soekarno, ditandai dengan adanya pemabrontakan DII/TII walaupun pada akhirnya gerakan yang dipimpin oleh Daud Bereuh itu bisa diredam. Pada era orde baru sentralisasi diterapkan oleh pemerintah, mengakibatkan ketimpangan yang sangat jelas antara pusat dan daerah, kekayaan yang melimpah dieksploitasi secara berlebihan oleh pengusaha dan perusahaan milik negara yang hasilnya tidak memabwa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga membuat angka kemiskinan pun meningkat, kondisi ini direspon dengan banyak gejolak perlawanan yang terjadi di berbagai daerah yang di latarbelakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi pemerintah pusat dan kurangnya perhatian terhadap pembangunan daerah yang berada di luar pulau Jawa, di Aceh sendiri pemerintah menjalankan proyek gas alam yang hasilnya berbanding terbalik dengan kemajuan Aceh

sendiri, sehingga terjadi gejolak dalam bentuk gerakana terdapat organisasi yang menamakan dirinya sebagai Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Organisasi yang dikenal oleh pemerintah sebagai gerakan separatis ini mempunyai idoeologi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka atau yang lebih dikenal dengan GAM ini dipimpin oleh Hasan Tiro yang di proklamirkan pada tanggal 4 Desember 1976 di Pidie, GAM juga dikenal dengan ASNLF (*Aceh Sumatera National Liberation Front*) nama tersebut hanya digunakan bila berhubungan dengan dunia internasional. Jumlah pengikut awal GAM kurang lebih berkisar 200 orang, pengikut awal ini juga tidak semuanya ikut aktif dan mayoritas dari mereka berasal dari kabupaten Pidie tempat tinggal dari Hasan Tiro, sehingga bisa dikatakan masih mempunyai ikatan keluarga dengan pimpinan GAM tersebut. Pada perkembangannya GAM memulai teror dan menunjukkan eksistensinya dengan menyerang PT Arun NGL pada tahun 1977, selain melakukan kontak teror langsung GAM juga melakukan propaganda untuk menyebarkan ideologinya dalam rangka meluaskan sayap organisasi. GAM juga melalukakn politik luar negeri untuk mendapatkan dukungan dari dunia Intenrasional, terbukti dengan behasilnya Hasan Tiro sebagai pimpinan GAM yang mendapatkan suaka politik ke Swedia, ia dibantu oleh UNHCR salah satu bagian komisi PBB yang mengurus perihal suaka politik. Politik luar negeri GAM bisa dibilang berjalan bagus, banyak organisasi internasional yang terlibat dengan GAM sepeti ICRC, Amnesti Internasional, UNPO (*Unpresented Nations and Peoples Organization*), dengan keadaan pemimpin yang berada diluar negeri GAM dimudahkan oleh akses untuk menghadiri banyak konferensi internasional serta terlibat dalam kerja-kerja dengan kelompok yang ingin memisahkan diri dengan negaranya.

Perkembangan GAM dapat bagi atas tiga fase penting yaitu pertama, 1976-1989, GAM merupakn organisasi kecil yang anggotanya di dominasi dari kamu terpelajar dan GAM menajdi gerakan bawah tanah. Fase kedua, 1989-1998 fase ini lebih dikenal dengan DOM (Daerah Operasi Militer) dan menjadi jalan bagi operasai bersenjata di Aceh. Fase ketiga, pasca 1998 fase

ini pemerintah pusat masih menggunakan kekerasan sehingga memunculkan semangat nasionalisme Aceh.

Kedua, upaya penyelesaian konflik dengan GAM dilakukan, melihat GAM yang terus berkembang pemerintah pusat tidak tinggal diam untuk menumpas gerakan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, operasi militer dilakukan dan Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer, berbagai pendekatan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh, pendekatan melalui perjanjian dan diplomasi maupun pendekatan dengan kekuatan militer. Terbukti dengan adanya operasi-operasi diantaranya, Operasi Wibawa, Operasi Sadar Rencong I, Operasi Sadar Rencong II, Operasi Sadar Rencong III, Operasi Cinta Meunasah, dan Operasi Cinta Damai. Pendekatan secara negosiasi juga dilakukan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mencapai kesepakatan dalam bentuk perjanjian, diantaranya Jeda Kemanusiaan, Penghentian Permusuhan dan MoU Helsinki. Pendekatan secara non formal juga dilakukan oleh pemerintah, salah satunya pada pemerintahan Gus-Dur, Aceh diberikan kewenangan untuk merdeka dan membangun negara dengan ideologi Islam, namun hal itu urung terjadi dikarenakan internal GAM terpecah belah. Upaya dalam penyelesaian masalah terus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga melibatkan lembaga pihak ketiga seperti HDC dan CMI, hal ini berdampak dengan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan konflik.

Proses pemberian otonomi daerah kepada Aceh diawali dengan mekanisme perundingan terdapat, yang sebelumnya selalu urung dilakukan akibat pendekatan pemerintah yang menggunakan kekuatan militer, hingga akhirnya kedua pihak sepakat untuk melakukan perundingan upaya damai pada tanggal 27-29 Januari 2005 di Helsinki. Adanya faktor bencana alam yang terjadi di Aceh berupa gempa bumi dan tsunami menjadi salah satu penentu lainnya dalam konflik ini, sehingga banyak membentuk kesadaran di kedua belah pihak yang terus terkungkung dalam dinamika konflik yang sangat Panjang. Kesadaran akan integrasi bangsa menjadi poin penting yang dapat diambil dalam bencana ini, sehingga perundingan menuju hasil kesepakatan damai berjalan lancar. Perundingan tersebut mencapai hingga

empat babak, yang dimana pada perjalanannya menghasilkan banyak dinamika diantar kedua belah pihak salah satunya permintaan Aceh mengenai *Self Government* yang mendapat tanggapan hangat dari pihak pemerintah pusat, walaupun pada akhirnya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan syarat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan tetap mengacu kepada UUD. Setelah semua kesepakatan diselaraskan perundingan ini mencapai puncaknya pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki lahirlah “Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan GAM” atau juga dikenal dengan *MoU Helsinki* terdapat 6 butir pokok persoalan penting yang selanjutnya akan diberlakukan di Aceh salah satunya adalah Penyelenggara Pemerintah Aceh yang dituangkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat otonomi daerah.

Setelah Aceh mendapatkan otonomi daerah dan semua konflik selesai Aceh menjadi daerah yang berbeda dengan daerah yang lainnya, di Aceh sendiri Hukum pemerintahan menganut dan berkiblatb kepada ajaran agama Islam, ada beberapa hukum yang mengadopsi hukum-hukum, salah satunya terdapat hukum cambuk, dan ini diatur oleh undang-undang pemerintahan daerah atau lebih dikenal dengan *Qanun*, setelah perundingan ini juga di Aceh terdapat aparat pembantu pemerintah yang dinamakan Polisi Syariah atau dikenal juga dengan Wilayatul Hisbah tugasnya adalah melakukan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Polisi Syariah berhak menangkap dan melakukan Razia terhadap orang yang berduaan tanpa memiliki ikatan pernikahan serta mempunyai tugas dalam mengawal kode etik berpakaian muslim yang berada di Aceh, hal tersebut dinamakan dengan aturan khalwat. Hal berbeda lainnya daerah Aceh dengan daerah lain adalah terdapatnya partai lokal, Tujuan dari pendirian partai lokal adalah untuk mempermudah dan kelompok yang tergabung dalam GAM mengorganisasi kembali kekuatan mereka dan melakukan perjuangan melalui ranah politik konstitusional, para anggota GAM dan simpatisanya sadar harus memulai era baru dalam mengisi perdamaian dengan jalur politik, dengan adanya partai lokal ini memudahkan masyarakat Aceh dalam menyampaikan aspirasinya tidak harus lagi memanggul senjata agar suaranya didengar.

### 5.3 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada Sejarah dan Latar Belakang Aceh dalam mendapatkan Otonomi Daerah, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan Sejarah Aceh dan Otonomi daerah. Rekomendasi yang sebaiknya dapat penulis berikan adalah:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijadikan rujukan materi pelajaran sejarah kelas XII kompetensi dasar 3.1 tentang mengevaluasi upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan perlawanan.
2. Untuk penelitian selanjutnya penelitian yang penulis kaji dapat dilanjutkan dengan mengkaji tentang Partai Lokal Aceh setelah Aceh mendapatkan otonomi daerah yang dimana GAM bertransformasi menjadi gerakan Politik.